



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023

PEMERINTAH KAB. PATI



DIGITAL GOVERNMENT
SPBE SUMMIT
KEMPINSKI GRAND BALLROOM - JAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2023 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perbaikan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan yang selaras dengan kebijakan nasional. Selain itu, evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 26 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

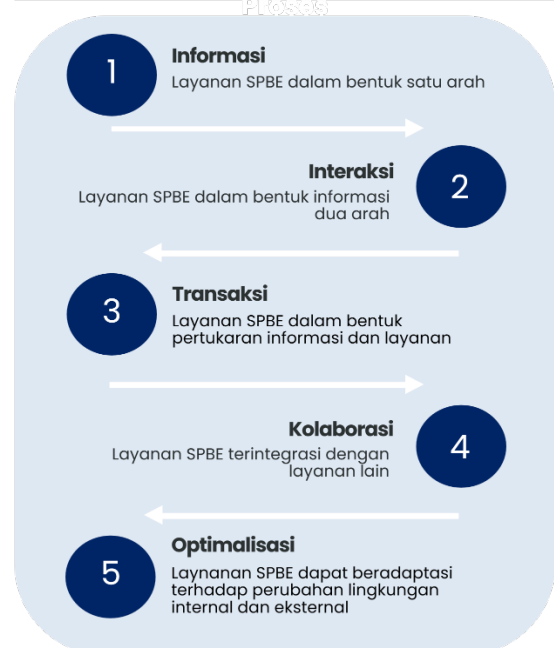
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi

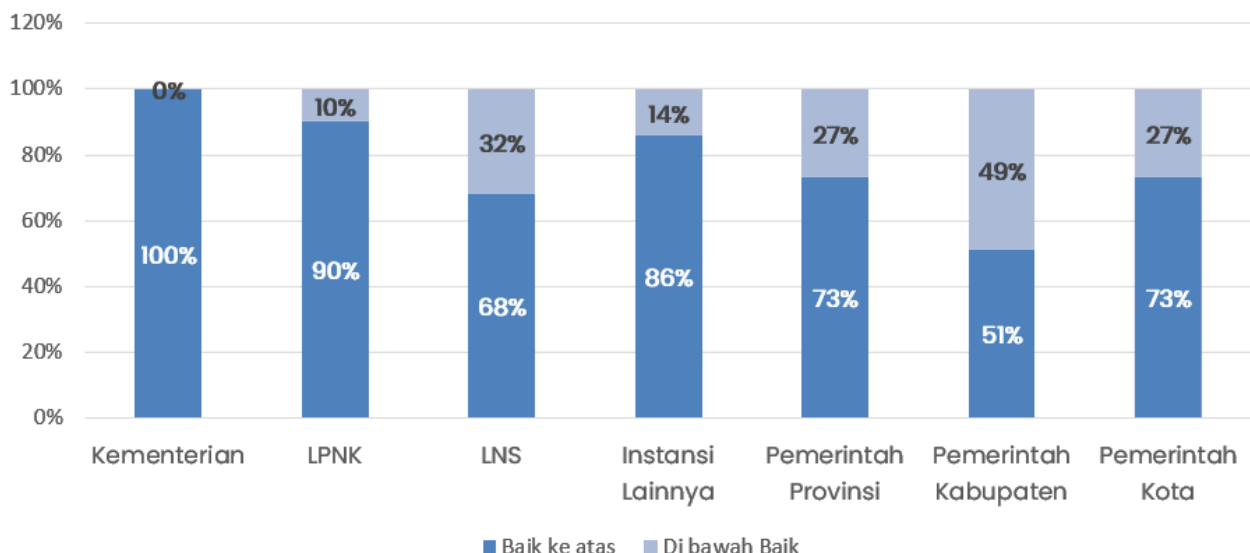


EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

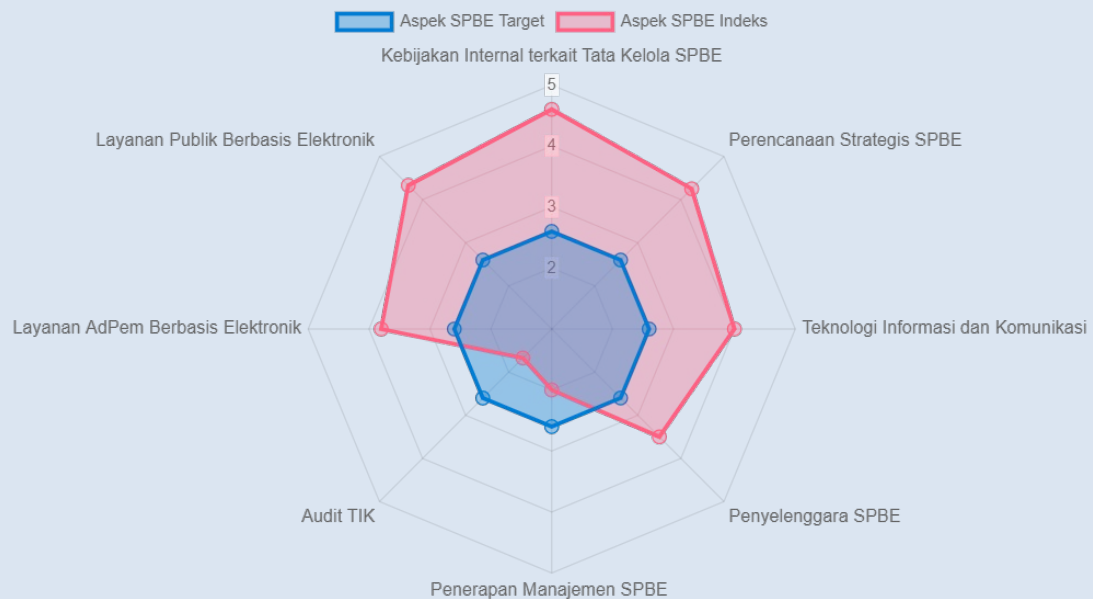
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2023



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	3,74
Domain Kebijakan SPBE	4,60
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	4,60
Domain Tata Kelola SPBE	4,00
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	4,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	4,00
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,50
Domain Manajemen SPBE	1,91
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,00
<i>Audit TIK</i>	1,67
Domain Layanan SPBE	4,01
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,80
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,33

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan pemenuhan dan pencapaian tingkat kematangan pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE oleh Kabupaten Pati sudah sangat baik dengan pencapaian nilai indeks 4.60.

- **Kekuatan**

Secara keseluruhan pemenuhan kebijakan pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE oleh Kabupaten Pati sudah sangat baik, dimana hampir semua nilai setiap indikator sudah mencapai sempurna, dan hanya ada 2 indikator yang baru mencapai level 3 yaitu indikator 2 Kebijakan Peta Rencana dan Indikator 9 Kebijakan Internal Audit TIK dimana secara kebijakan sudah memenuhi keseluruhan tinggal disempurnakan dengan pelaksanaan reviu dan evaluasi secara periodik dan menindaklanjutinya secara berjkelanjutan sesuai dengan hasil evaluasi.

- **Kelemahan**

Berdasarkan hasil evaluasi, secara keseluruhan pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE di Kabupaten Pati, tidak ditemukan adanya kelemahan, bahkan nyaris mencapai level sempurna. Masih ada peluang perbaikan pada indikator 2 Kebijakan Peta Rencana dan Indikator 9 Kebijakan Internal Audit TIK dimana secara kebijakan sudah memenuhi keseluruhan tinggal disempurnakan dengan pelaksanaan reviu dan evaluasi secara periodik untuk mencapai level 4 dan menindaklanjutinya secara berjkelanjutan sesuai dengan hasil evaluasi agar memperoleh nilai sempurna, 5.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan pemenuhan dan pencapaian tingkat kematangan pada aspek ini oleh Kabupaten Pati sudah sangat baik dengan pencapaian nilai indeks 4.25.

- **Kekuatan**

Secara keseluruhan pemenuhan kebijakan pada aspek Perencanaan Strategis SPBE oleh Kabupaten Pati sudah sangat baik dengan level 4.25, dimana 3 dari 4 indikator sudah mencapai sempurna, dan hanya ada 1 indikator yang baru mencapai level 2 yaitu indikator 12 Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dimana peta rencana sudah ada tetapi belum mencakup keseluruhan muatan peta rencana sebagaimana mestinya sebagai berikut Tata Kelola SPBE Manajemen SPBE Layanan SPBE Infrastruktur SPBE Aplikasi SPBE Keamanan SPBE dan Audit TIK.

- **Kelemahan**

Berdasarkan hasil evaluasi, secara keseluruhan pada aspek Perencanaan Strategis SPBE oleh Kabupaten Pati masih ada indikator yang baru mencapai level 2 yaitu indikator 12 Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dimana peta rencana sudah ada tetapi belum mencakup keseluruhan muatan peta rencana. Perlu di evaluasi dan di sempurnakan agar Peta Rencana yang ada dapat mencakup keseluruhan muatan peta rencana sebagaimana mestinya sebagai berikut Tata Kelola SPBE Manajemen SPBE Layanan SPBE Infrastruktur SPBE Aplikasi SPBE Keamanan SPBE dan Audit TIK.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan pemenuhan dan pencapaian tingkat kematangan pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Kabupaten Pati sudah sangat baik dengan pencapaian nilai indeks 4.00.

- **Kekuatan**

Secara keseluruhan pemenuhan kebijakan pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Kabupaten Pati sudah sangat baik dengan level 4.00, dimana 2 indikator sudah mencapai sempurna, yaitu Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data dan Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra IPPD dan 2 indikator yang lainnya mencapai level 3 yaitu indikator Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE dan Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung IPPD dimana ke-4 indikator pada aspek ini sudah memenuhi keseluruhan pemenuhan tinggal pada dua indikator 15 dan 18 dapat disempurnakan dengan pelaksanaan reviu dan evaluasi secara periodik dan menindaklanjutinya secara berjkelanjutan sesuai dengan hasil evaluasi.

- **Kelemahan**

Berdasarkan hasil evaluasi, secara keseluruhan pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Kabupaten Pati masih ada peluang perbaikan pada indikator 15 Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE dan indikator 18 Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung IPPD. Tingkat kematangan pada kedua Indikator ini masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan evaluasi, reviu, dan perbaikan berkelanjutan dan di sempurnakan agar pada keduanya dapat diperoleh nilai 4 bahkan level 5.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan pemenuhan dan pencapaian tingkat kematangan Penyelenggara SPBE oleh Kabupaten Pati sudah baik dengan pencapaian nilai indeks 3.50.

- **Kekuatan**
Secara keseluruhan pemenuhan kebijakan pada aspek Penyelenggara SPBE oleh Kabupaten Pati sudah baik dengan level 3.50, dimana 1 indikator, yaitu indikator 19 hampir mencapai sempurna dengan nilai 4 untuk Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan 1 indikator yang lainnya yaitu indikator 20 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE mencapai level 3. Untuk peningkatan dan perbaikan pada aspek ini diperlukan proses reviu dan evaluasi secara periodik dan menindaklanjutinya secara berkesinambungan sesuai dengan hasil evaluasi.
- **Kelemahan**
Berdasarkan hasil evaluasi, IPPD telah menetapkan dan membentuk tim Kolaborasi Penerapan SPBE formal, serta sudah melakukan pertemuan secara rutin namun masih dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah, dan untuk Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE IPPD perlu dilakukan peningkatan/perbaikan sebagai hasil tindak lanjut reviu dan evaluasi.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan pemenuhan dan pencapaian tingkat kematangan Penerapan Manajemen SPBE oleh Kabupaten Pati masih rendah dengan pencapaian nilai indeks 1.91.

- **Kekuatan**
Secara keseluruhan pemenuhan Penerapan Manajemen SPBE oleh Kabupaten Pati sudah menerapkan ke-8 Manajemen mulai dari Manajemen Risiko, Kemanan Informasim Data, Aset TIK, SDM, Pengetahuan, Perubahan, dan Layanan SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE, namun pelaksanaannya belum mengacu pedoman yang berlaku. Dengan menyusun dan membuat pedoman-pedoman acuan untuk penerapan ke-8 manajemen dalam SPBE tersebut, maka dipastikan Kabupaten Pati akan memperoleh indeks penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini menjadi baik bahkan sangat baik dan sempurna.
- **Kelemahan**
Berdasarkan hasil evaluasi, Kabupaten Pati dalam pelaksanaan penerapan manajemen SPBE belum mengacu kepada pedoman masing-masing manajemen mulai dari Manajemen Risiko, Kemanan Informasim Data, Aset TIK, SDM, Pengetahuan, Perubahan, dan Layanan SPBE yang berlaku.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan pemenuhan dan pencapaian tingkat kematangan Penerapan Manajemen Audit TIK SPBE oleh Kabupaten Pati masih rendah dengan pencapaian nilai indeks 1.67.

- **Kekuatan**
Secara keseluruhan dan pencapaian tingkat kematangan Audit TIK oleh Kabupaten Pati masih sangat rendah dengan pencapaian nilai indeks 1.67. Kekuatannya adalah Kabupaten Pati sudah melaksanakan ketiga audit sesuai dengan peta rencana yang ada, meskipun pemeriksaannya hanya meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan.
- **Kelemahan**
Berdasarkan hasil evaluasi, Kabupaten Pati dalam pelaksanaan ketiga Audit TIK (infrastruktur, Aplikasi, Keamanan) belum meliputi seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan pemenuhan dan pencapaian tingkat kematangan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Kabupaten Pati sudah baik dengan pencapaian nilai indeks 3.80

- **Kekuatan**
Secara keseluruhan pemenuhan Penerapan aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Kabupaten Pati sudah menerapkan ke-10 indikator layanan dengan menyediakan layanan-layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi perencanaan kegiatan dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan tersebut. Bahkan dalam 4 layanan sudah berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya dan sudah dilaksanakan reviu dan evaluasi dan ada satu layanan yang sudah memiliki tingkat kematangan 5 yaitu layanan pengadaan barang dan jasa. Layanan yang lainnya berpotensi untuk ditingkatkan ke tingkat kematangan yang lebih baik.
- **Kelemahan**

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Kabupaten Pati masih banyak yang belum melakukan reviu dan evaluasi secara periodik, dan mengeksekusi hasilnya secara berkelanjutan. Layanan juga masih berdiri masing-masing belum berkolaborasi.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan pemenuhan dan pencapaian tingkat kematangan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik oleh Kabupaten Pati sudah baik dengan pencapaian nilai indeks 4.33.

- **Kekuatan**

Secara keseluruhan pemenuhan Penerapan aspek Layanan Sektor Publik Berbasis Elektronik oleh Kabupaten Pati sudah menerapkan ke-6 indikator layanan dengan menyediakan layanan-layanan sektor publik sudah sangat baik. Bahkan dalam 4 layanan sudah berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya dan sudah dilaksanakan reviu, evaluasi dan bertindak lanjut sesuai evaluasinya sehingga sudah memiliki tingkat kematangan 5. Dua Layanan Publik Sektor yang lainnya berpotensi untuk ditingkatkan ke tingkat kematangan yang lebih baik.

- **Kelemahan**

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Layanan Sektor Publik Berbasis Elektronik oleh Kabupaten Pati masih ada dua layanan sektor publik yang belum melakukan reviu dan evaluasi secara periodik, dan mengeksekusi hasilnya secara berkelanjutan. Layanan juga masih berdiri masing-masing belum berkolaborasi.

REKOMENDASI

Fokus untuk merancang, mempersiapkan, melaksanakan proses ketiga Audit TIK (infrastruktur, Aplikasi, Keamanan) dengan memastikan audit yang dilaksanakan meliputi seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan sesuai dengan pedoman standar audit yang ada dan direkomendasikan.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	5
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	5
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	2
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5